

TANPA HARUS MENGIKUTI PPG

1,6 Juta Guru Diputihkan

JAKARTA (KR) - Pemerintah berencana memutihkan 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi dengan tanpa mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hal itu dikarenakan sebanyak 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi tersebut, harus antri dalam pendaftaran PPG. Implikasinya, mereka belum memiliki penghasilan layak.

Demikian disampaikan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek, Anindito Aditomo dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (13/9). "Solusinya kita putihkan, di-

anggap sudah memenuhi syarat sertifikasi. Guru ASN ditingkatkan tunjangan jabatan fungsionalnya, yang non-ASN ditingkatkan melalui Dana BOS yang kita prioritaskan untuk kesejahteraan guru," terangnya.

Apabila PPG tidak lagi menjadi syarat untuk memperoleh penghasilan yang layak, lanjut Anindito, guru tidak perlu lagi melakukan PPG. Skema yang ada di bawah regulasi saat ini menjadi bukti, untuk sertifikasi 1,3 juta guru membutuhkan waktu hingga 18 tahun.

"Bagaimana kalau PPG tidak jadi syarat bagi penghasilan atau malahan akan malas

PPG? Ya tidak perlu PPG. Guru yang 1,6 juta itu kalau mereka harus antri PPG, bisa bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun. Kenapa kita ubah sistemnya, karena sistem yang sekarang tidak berjalan," tegas Anindito.

la menambahkan, kesejahteraan guru seharusnya terlebih dahulu diperhatikan sebelum bicara soal kualitas. Sebab, jika penghasilan belum layak, peningkatan kualitas merupakan hal yang sulit. Pihaknya yakin peningkatan kualitas lebih mudah jika guru sudah mendapatkan pendapatan yang layak. (Ati-d)

Gubernur

"Dalam surat somasi tersebut terdapat tiga tindakan yang harus segera dilakukan perusahaan. Pertama menghentikan segala kegiatan pembangunan pada lokasi Persil I Kelas III D luas 11.215 meter yang terletak di Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman. Kedua, menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/1Z/2016. Sedangkan ketiga, segera melengkapi perizinan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," papar Bayu.

Menurut Bayu, somasi itu dilakukan karena mereka (pengembang) belum ada izin resmi. Padahal seharusnya dalam melakukan pembangunan harus melengkapi semua persyaratan salah satunya terkait IMB. Selain itu perlu diketahui bahwa kalurahan tidak memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikat Hak

KPK

ada transaksional dengan oknum di Pemkot Yogyakarta.

KPK, juga memanggil seorang saksi lainnya, yaitu Daniel Feriyanto, pihak swasta. Namun, ia tidak memenuhi panggilan tanpa mengonfirmasi. "Untuk itu, kami ingatkan agar saksi kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada kesempatan panggilan berikutnya," tegas Ali.

KPK telah menetapkan HS bersama

Pengelolaan Lahan (HPL).

Oleh karenanya pada Agustus 2022 lalu, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY telah melakukan penyegelan perumahan milik pengembang yang terindikasi melanggar regulasi tersebut.

"Penegakan dilakukan Satpol PP DIY, Disperparu DIY, dan Biro Hukum DIY, jadi perlu dihentikan. Karena berdasarkan Perdais 1/2017 dan Pergub DIY No.34/2017 harus ada izin ini terlebih dahulu, ini malah sudah dibangun," terang Bayu.

Lebih lanjut Bayu menambahkan, selain dilakukan pengawasan terhadap TKD, Pemda DIY juga melakukan pengawasan terhadap Tanah Kasultanan/Sultan Ground dan Tanah Kadipaten/Pakualaman Ground. Pengawasan dilakukan untuk 1.010 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah

dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan menerima suap, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) Kota Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH), dan Triyanto Budi Yuwono (TBY) sekretaris pribadi merangkap ajudan HS.

Sedang yang diduga sebagai pemberi suap adalah Oon Nushiono (ON) selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk. (Ful)-f

Kadipaten yang telah memiliki Serat Kekancingan.

Di sisi lain, Pemda DIY melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY juga memberikan surat teguran kepada kalurahan yang menjadi lokasi perumahan tersebut.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY Krido Suprayitno menjelaskan, pihak kalurahan dinilai melakukan penyalahgunaan terhadap perizinan yang diberikan Gubernur DIY terkait pemanfaatan TKD di wilayahnya.

Kalurahan tersebut merupakan salah satu dari 32 kalurahan yang mendapatkan surat teguran dari Pemda DIY terkait izin pemanfaatan TKD. Indikasi penyelewengan izin ini didapatkan atas adanya pengawasan izin pemanfaatan TKD yang dilakukan Pemda DIY selama tiga tahun terakhir (2019-2022).

"Perlu diketahui selama kurun 2019-2021, tercatat 286 TKD atau 76 persen telah dimanfaatkan sesuai perizinannya dan 84 TKD atau 24 persen tidak dimanfaatkan sesuai perizinannya. Sementara, pengawasan yang dilakukan tahun 2022 pada 231 TKD masih dalam proses. Dengan demikian, selama kurun waktu 2019-2022, Pemda DIY telah melakukan pengawasan pada 583 TKD di 72 kalurahan di DIY dari total 1.479 TKD yang telah mendapatkan izin Gubernur DIY selama kurun 2004-2022," jelasnya. (Ria)-d

Sopir

diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada Komisi Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. "Kedua, sanksi administrasi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun," kata kata Rachmat Pamudji.

Dalam sidang tersebut juga dibacakan fakta yang meringankan Bharada Sadam sebagai terduga pelanggaran kooperatif dalam memberikan keterangan saat persidangan. Akibat perbuatan terduga pelanggaran telah menjalani penempatan khusus (patus) selama 20 hari di Mako Brimob.

Sementara itu, fakta yang memberatkan, perbuatan Bharada Sadam telah menjadi pemberitaan viral di media mainstream dan media daring.

Dalam sidang etik tersebut dibacakan, Bharada Sadam melakukan perbuatan berupa telah mengintimidasi dan mengambil foto dan video yang tersim-

pan pada ponsel wartawan detik.com dan CNN yang melakukan peliputan di rumah pribadi mantan Kadiv Propam Polri FS di Jalan Saguling II Jakarta Selatan, sehingga menyebabkan pemberitaan tersebut viral.

Ketua sidang komisi mengatakan, perbuatan tersebut menghambat kebebasan pers. Hendaknya Bharada Sadam selaku anggota Polri dapat diberikan pengertian secara santun. Bharada Sadam tergabung dalam Pleton 3 KI Markas Yon D Resimen I Paspelopor Korbrimob Polri pada tanggal 22 Agustus lalu bersama 23 anggota Polri lainnya dimutasi sebagai Tamtama Pelayanan Markas (TA Yanma) Polri.

Setelah kasus Brigadir J bergulir, sampai hari ini Polri telah melaksanakan sidang etik terhadap delapan anggota Polri. Lima di antaranya dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau

(PTDH), yakni Irjen Pol FS, Kombes Pol Agus Nur Patria, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo dan AKBP Jerry Raymond Siagian.

Dua orang dijatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun terhadap AKP Dyah Chadrawathi dan Bharada Sadam. Sementara itu, AKBP Pujiyarto dijatuhkan sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi dan pimpinan Polri.

Saat ini ada tiga anggota Polri terkait dengan pelanggaran etik berat terlibat dalam menghalangi penyidikan kasus Brigadir J (*obstruction of justice*) yang menunggu untuk disidang etik, yakni mantan Karo Paminal Propam Brigjen Pol Hendra Kurniawan, mantan Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman Arifin dan mantan Kasubint I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto. (Ant/Obi)-d

Data

Sedangkan Indonesia masih mengandalkan peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi, Undang-undang ITE serta puluhan aturan lainnya yang bersifat generik.

Perlindungan data pribadi sejatinya telah diamanatkan UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) yang menegaskan : *i>Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.i*

Kehadiran UU PDP mutlak diperlukan. Perjalanan panjang pembahasan

dan penyusunan RUU PDP sejak tahun 2016 baru disepakati di tingkat panitia kerja pada September 2022. Ketua Panitia menyebutkan, RUU PDP akan segera disahkan menjadi undang-undang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Hadirmya UU PDP diharapkan mampu menjalankan fungsinya untuk bersinergi dan harmoni dengan perundang-undangan lainnya. Sehingga data pribadi yang dikatakan telah menjadi aset strategis negara benar benar mampu terjaga. Karena menjaga data pribadi warga negara sama halnya dengan menjaga kedaulatan negara.

Adanya UU PDP hanya langkah awal untuk meminimalisir bocornya data pribadi. Hal penting lainnya yang diperlukan

untuk menjaga keamanan data pribadi adalah peran serta masyarakat. Artinya, masyarakat harus memiliki kesadaran maksimal untuk tidak mudah memberikan datanya pada siapapun tanpa keperluan yang jelas.

Mari kita tunggu dan sambut disahkannya RUU PDP menjadi UU. Meski di era serba digital tetap tidak ada yang bisa menjamin keamanan data secara maksimal. Di era semua dalam genggaman, kearif dalam mengunggah data pribadi dimedia sosial menjadi hal penting yang bisa kita lakukan. Mari kita jaga data kita, oleh kita, dari diri kita, untuk keamanan data pribadi kita. (Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII, Staf Pengajar Muallimin Yogyakarta)-f

PSIM

Ada Si A yang pernah pegang PSIM di masa lalu, tapi masih kami bahas. Setidaknya kalau dua orang sudah ada namanya, saat ini masih kita pertimbangkan," tegasnya

Lebih lanjut Bima juga menjelaskan, untuk mempersiapkan tim menghadapi laga-laga lanjutan Kompetisi Liga 2 musim ini, termasuk laga terdekad kontra FC Bekasi City, Manajemen PSIM Yogyakarta langsung menunjuk Asisten Pelatin, Dwi Priyo Utomo sebagai caretaker atau pelatih sementara.

Diketahui, PSIM Yoga saat ini tengah mempersiapkan diri demi mendapatkan hasil terbaik dalam laga melawan FC Bekasi City

Sambungan hal 1

pada Senin (19/9) mendatang. "Untuk persiapan pertandingan menghadapi Bekasi FC, kami menunjuk Asisten Pelatih Dwi Priyo Utomo sebagai caretaker," ungkap Bima.

Imran selama menjalankan posisinya sebagai Pelatih Kepala PSIM Yogyakarta di Kompetisi Liga 2 musim 2022/2023 tercatat belum memberikan hasil memuaskan. Dari tiga pekan pertama menunjuk Sunni Hizbullah dan kawan-kawan, Imran hanya mampu mendulang tiga poin hasil tiga laga imbang kontra Persikab Kabupaten Bandung, Nusantara United dan terakhir diimbangi PSCS Cilacap. (Hit)-f

Sultan

Meski saat ini Malioboro Mall dan Hotel Ibis dikelola oleh manajemen baru, Sultan memastikan ratusan karyawan di Malioboro Mall dan Hotel Ibis tidak akan di-PHK. Sebab mall tetap akan dibuka seperti biasanya dengan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen baru. Karena itu seandainya ada pegawai yang merasa diberhentikan pekerjaannya, ada kemungkinan kebijakan tersebut dilakukan oleh manajemen lama. Meski begitu karyawan lama akan mendapat prioritas untuk bekerja kembali.

"Tidak, *nggak ana sing di-PHK* (tidak ada yang di-PHK). Karena kami minta mall saja tidak ditutup. Kalau ditutup, masalah. Jadi sebetulnya PHK itu tidak ada. Karena pegawai yang ada diprioritaskan untuk bekerja kembali, jadi tidak ada PHK (oleh manajemen baru)," ungkap Sultan.

Dengan adanya manajemen baru, Sultan memastikan karyawan lama otomatis akan masuk ke manajemen baru. Jadi harus terdaftar ikut manajemen baru. Meski begitu karyawan lama tidak perlu lagi diseleksi ulang. Mengingat mereka akan mendapatkan prioritas untuk menjadi tenaga kerja di manajemen mal dan hotel yang baru.

"Tidak ada seleksi ulang (karyawan lama), dan prioritas. Saya minta tidak dipensiun," ujar Sultan. Sedangkan Juru bicara Manajemen Baru Malioboro Mall dan Ibis Hotel, Surya Ananta mengungkapkan, PT Setia Mataram Tritunggal ditunjuk melakukan pengelolaan Malioboro Mall dan Hotel Ibis tertanggal 13 September 2022.

Dalam pengembangan usaha ke depan, manajemen baru tetap membuka kesempatan kerja bagi pegawai di mall dan hotel. Karenanya karyawan dan tenant diharapkan tetap bekerja dan buka.

"Semaksimal mungkin untuk ke depan pengelolaan mall dan hotel dilakukan sebaik-baiknya. Kami berharap dengan manajemen yang baru akan jauh lebih baik dan memberdayakan semua pihak yang ada di sana," ungkapnya.

Sekda DIY Baskara Aji ketika ditemui di DPRD DIY menyatakan, manajemen baru secara otomatis memiliki kewenangan untuk mengelola Hotel Ibis maupun Malioboro Mall.

Sambungan hal 1

Termasuk mengatur soal karyawan. Intinya, jika karyawan tersebut masih ingin bekerja dan manajemen baru juga membutuhkan, ya tetap akan bekerja.

Hanya saja, karyawan sebelumnya direkrut oleh PT YIS. Karena sudah berganti manajemen, otomatis beberapa karyawan juga akan berhenti dari PT YIS. "Berhentinya seperti apa? Apakah PHK atau bagaimana ya itu kewenangannya PT YIS," jelas Aji.

Mengenai mekanisme perekrutan dengan manajemen baru, tentu tetap melalui tahapan dari proses rekrutmen pada umumnya. Seperti mengirimkan surat lamaran kerja, beserta CV dan yang lain.

Apakah akan memprioritaskan karyawan lama, Aji memastikan pengelolaan baru pasti membutuhkan karyawan yang berpengalaman di bidang tersebut. "Jadi saya kira tinggal jumlah yang dibutuhkan saja," ujarnya.

Aji menjelaskan, jika manajemen Hotel Ibis dan Malioboro Mal dikelola oleh satu manajemen dengan sistem sewa satu tahun. Ke depannya akan dilakukan evaluasi lagi. Karena Pemda memiliki dua pilihan. Pertama, sewa maksimal lima tahun dengan sistem bayar di depan.

"Kedua, kerja sama pemanfaatan aset atau KSP yang dapat dilakukan 20 tahun dan bisa diperpanjang hingga 30 tahun. Akan kita lihat satu tahun ke depan. Mana yang lebih menguntungkan bagi Pemda," ungkapnya.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo menyatakan, pihaknya menunggu

arahan Gubernur DIY terkait pengambilalihan hotel dan mal tersebut. Dari sektor pariwisata, keduanya baik mall maupun hotel diharapkan tetap menjadi daya tarik tersendiri khususnya di kawasan Malioboro.

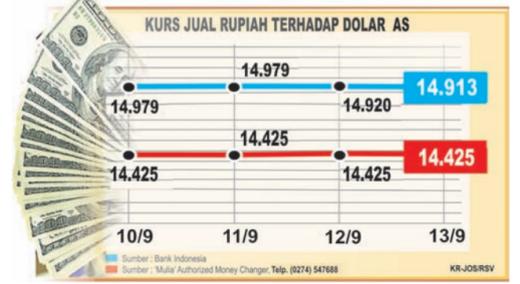
"Prinsipnya kita *ndherek* arahan Pak Gubernur. Termasuk nasib karyawan-karyawan Malioboro Mall dan Hotel Ibis yang terdampak pasti akan dipikirkan. Doakan saja agar segera ada solusinya," ujarnya.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono mengaku belum mendapatkan informasi perihal pengambilalihan aset tersebut baik dari manajemen Hotel Ibis maupun manajemen Malioboro Mall.

"Hotel Ibis Malioboro itu memang member PHRI DIY, tetapi kami belum mendapatkan informasi detail sejauhmana kejadian tersebut. Jadi kami belum bisa berkomentar apa-apa. Tetapi harapan kami ada solusi bijak akan nasib para karyawan yang bekerja di Hotel Ibis maupun Malioboro Mall," tandasnya.

Deddy berharap agar manajemen baru yang akan mengelola hotel dan mal tersebut bisa mempekerjakan eks karyawan sebelumnya. Dengan demikian situasi kondusif dunia perhotelan di DIY yang istimewa ini dapat terjaga.

"Kita tahu Yogyakarta itu guyub rukun, saya kira manajemen baru bisa mewujudkan. Jika manajemen membuka lowongan pekerjaan bisa diprioritaskan bekas karyawan yang lama," imbuhnya. (Ria/Awh/Ira)d



Prakiraan Cuaca						Rabu, 14 September 2022			
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban			
Bantul					23-31	60-95			
Sleman					23-30	60-95			
Wates					23-31	60-95			
Wonosari					23-30	60-95			
Yogyakarta					23-31	60-95			
	Cerah		Berawan		Udara Kabur		Hujan Lokal		Hujan Pelir

Psikologi Marketing; Musisi Jalanan dengan Lagu Religinya

Kadek Kiki Astria SIKOM MA
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

BEBERAPA bulan terakhir sering kita jumpai musisi jalanan di banyak perempatan – perempatan besar di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Ada yang solo namun ada juga yang berkelompok, musisi-musisi jalanan tersebut bernyanyi dengan sound system yang cukup menarik perhatian. Munculnya musisi-musisi

jalanan dengan peralatan yang cukup memadai ini adalah imbas dari virus covid-19 yang sempat membuat kegiatan tetap muka diubah menjadi virtual. Para musisi yang biasanya bernyanyi di café ataupun tempat hiburan masyarakat terpaksa harus turun ke jalan karena tempat mereka mencari nafkah ditutup sementara bahkan ada pula yang ditutup secara permanen.

Diawali dengan bermunculannya manusia silver yang dijumpai hampir disetiap perempatan-perempatan, kini mulai dijumpai musisi-musisi jalanan yang bernyanyi menggunakan sound system yang cukup terdengar oleh para pengguna jalan raya. Namun dengan banyaknya pesaing yang ada (terkadang di satu titik perempatan terdapat manusia silver dan musisi jalanan dari

setiap arah) membuat persaingan mereka di jalanan pun semakin ketat. Mereka dituntut untuk lebih kreatif lagi.

Suara yang baik dan skill bermain gitar saja tidak cukup sebagai senjata berkompetisi di jalanan. Ide kreatif beberapa musisi jalanan kini muncul dengan membawakan lagu religi. Penerapan Psikologi marketing ini sudah mulai di jumpai di beberapa titik perempatan besar di kota Yogyakarta salah satunya adalah perempatan lampu merah Demak Ijo.

Psikologi marketing merupakan pemahaman terhadap motif-motif yang mampu mempengaruhi emosi dan tindakan pasar dalam proses pengambilan keputusan. Ada beberapa alasan yang membuat pendekatan ini berhasil meningkatkan pendapatan musisi jalanan, diantaranya;

- Berbeda;** Masya-rakat biasanya menjumpai musisi-musisi jalanan membawakan lagu lagu yang hits dijamannya yang mungkin sering didengarkan di playlist, kanal video berbagi, ataupun di tempat-tempat umum sehingga cenderung membuat pendengar cepat bosan dan tidak menikmati. Dengan membawakan lagu religi akan membawa perbedaan dan suasana baru bagi para masyarakat pengguna jalan raya yang mana mereka bisa menikmatinya sehingga mendorong pengguna jalan untuk mengapresiasi penampilan musisi jalanan tersebut. Dalam prinsip psikologi marketing, fenomena ini masuk pada prinsip kelangkaan. Semakin jarang dan berbeda produk atau jasa yang ditawarkan maka akan semakin

tertarik orang lain untuk memilikinya, dalam hal ini adalah mengapresiasinya.

- Pendengar merasa nyaman;** dengan mendengarkan lagu religi masyarakat cenderung merasa nyaman dan secara emosional juga dapat menenangkan hati para pengguna jalan yang lelah dengan rutinitas sehari-hari sehingga pengguna jalan akan terdorong untuk memberikan apresiasi pada musisi jalanan tersebut. dalam prinsip psikologi marketing hal ini masuk pada prinsip priming, dimana masyarakat akan terstimulus dan merasa nyaman.

- Pesan positif;** lagu religi biasanya pesan pesan positif yang dapat disampaikan pada para pengguna jalan yang dapat memicu masyarakat dalam berbuat positif. Sama

dengan poin 2, fenomena ini juga masuk pada prinsip priming dimana pendengar terstimulus sehingga pendengar dapat memperbaharui perilaku mereka dalam keputusan membeli (dalam hal ini adalah memberikan apresiasi) yang dapat membangkitkan emosional orang yang mendengarnya.

- Tidak ada batasan umur;** jika lagu-lagu yang dibawakan oleh kebanyakan musisi jalanan adalah lagu dengan segmentasi pendengar tertentu, berbeda dengan seniman yang membawakan lagu religi. Tidak ada batasan umur bagi para musisi jalanan yang membawakan lagu religi tersebut sehingga apresiasi yang diberikan untuk musisi jalanan tersebut juga akan lebih besar. Jangkauan audience yang luas dalam prinsip psikologi marketing

